

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Yogyakarta merupakan sebuah wilayah dengan daya tarik khusus, daerah yang terkenal akan kota pelajar, serta memiliki banyak wisata yang menarik untuk wisatawan berkunjung. Perkembangan Provinsi Yogyakarta semakin memberikan kesan positif bagi para pengunjung yang sedang berekreasi ke Yogyakarta, sehingga para wisatawan tentu akan menginginkan kembali untuk berkunjung ke Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri atas lima bagian yakni Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulonprogo, serta Kabupaten Bantul. Masing-masing daerah mempunyai tempat wisata yang khas dan menarik bagi wisatawan yang akan datang. Setiap kabupaten juga memiliki pengelola sendiri untuk pengembangan tempat wisata tersebut supaya wisata tersebut banyak pendatang dan menghasilkan pendapatan yang tinggi. Jika para pendatang merasa nyaman berwisata di Yogyakarta mereka akan menginap dan mencari penginapan atau hotel terdekat yang akan mempengaruhi terhadap peningkatan pajak hotel.

Menurut Rahmi (2018), Kota Yogyakarta merupakan kota yang kaya akan budaya karena terdapat dua pusat budaya yaitu Pura Pakualaman serta Kraton Kasultanan. Mempunyai dua budaya tersebut menjadikan Kota Yogyakarta sebagai daerah kesenian dan kebudayaan. Hal tersebut merupakan daya tarik bagi wisatawan yang akan datang.

Tabel 1.1
Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan ke Kota Yogyakarta Tahun
2019 – 2023

Tahun	Wisatawan Mancanegara	Wisatawan Nusantara	Total
2019	252.682	3.963.919	4.216.601
2020	37.008	1.329.562	1.366.570
2021	827	458.435	459.262
2022	62.261	2.658.606	2.720.867
2023	309.674	4.189.251	4.498.925

Sumber : Statistik Kepariwisata 2019 – 2023

Pengunjung yang berlibur ke Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan penurunan dari tahun 2019 hingga 2020. Namun, terlihat ada kenaikan pada tahun 2022 dan lonjakan yang lebih signifikan di tahun 2023. Berdasarkan data di atas, kunjungan wisatawan paling rendah ada di tahun 2021, berdasar data tercatat jumlah pendatang mancanegara sejumlah 827 serta pendatang wisatawan nusantara tercatat 459.262 sehingga untuk keseluruhan pendatang yang berwisata ke Kota Yogyakarta sebesar 459.262. Kunjungan wisatawan mengalami kenaikan di tahun 2023 dengan jumlah wisatawan mencapai 4.498.925. Kunjungan wisatawan menurun paling signifikan ada di tahun 2021 berhubung pada tahun tersebut Indonesia sedang menghadapi musibah penyakit menular Covid-19 yang membuat masyarakat harus tinggal di rumah untuk sementara waktu. Setelah peristiwa tersebut, di tahun berikutnya yaitu tahun 2022 terjadi peningkatan kunjungan yang bisa membuat perekonomian membaik kembali.

Jumlah pendatang wisatawan ke Daerah Istimewa Yogyakarta akan memberikan dampak bagi masyarakat maupun daerah. Makin meningkatnya jumlah pendatang wisatawan, maka akan semakin tinggi pula potensi pendapatan daerah yang diperoleh. Pendatang wisatawan nusantara atau mancanegara setiap tahunnya menunjukkan kenaikan yang bisa membuat peluang besar untuk Pemerintah Yogyakarta maupun masyarakat.

Oleh karena itu, untuk mengembangkan pendapatan daerah, pemerintah di sektor pariwisata wajib terus menambah dan mempermudah akses infrastruktur pariwisata. Ini penting agar sasaran peningkatan pendapatan bisa terwujud, sekaligus mendukung perbaikan serta penyempurnaan di bidang keuangan daerah. Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, selaku pihak penyelenggara harus proaktif saat menggali sumber-sumber pendapatan daerah, di antaranya melalui peningkatan jumlah pendatang wisatawan, optimalisasi objek wisata, serta retribusi pariwisata. Prosedur ini diharapkan menyumbang hal positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Merujuk pada kajian yang dilakukan oleh Mardiasmo (2018), Pendapatan Asli Daerah yaitu dana yang bersumber dari bermacam-macam rujukan, seperti retribusi daerah, keuntungan dari perusahaan milik pemerintah setempat, pajak daerah, pengelolaan aset daerah yang terpisah, serta sumber-sumber legal lainnya yang termasuk dalam kategori Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah didefinisikan sebagai pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penelitian Prasetyo, Siwi, dan Kudhani (2022), Pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti Pendapatan Domestik Regional Bruto, inflasi, jumlah penduduk, jumlah wisatawan, dan pengeluaran pemerintah. Pendapatan Domestik Regional Bruto berpengaruh pada pendapatan asli daerah karena adanya peningkatan kemampuan masyarakat dalam membayar, yang selanjutnya berkontribusi pada kenaikan pemasukan perpajakan daerah, serta pada penghujungnya memberikan efek pada Pendapatan Asli Daerah.

Dalam rangka mendukung jalannya pemerintahan dan kegiatan pembangunan, pemerintah daerah dapat mengimplementasikan kebijakan keuangan yang berfokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan dana dari pemerintah

pusat. Selain itu, peningkatan Pendapatan Asli Daerah juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas serta optimalisasi kualitas pelayanan masyarakat serta mendorong kualitas hidup penduduk di wilayah tersebut (Amerta dan Budhiasa, 2014).

Pembangunan nasional dan daerah memiliki visi yang sama yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Landasan hukum untuk pembangunan daerah melalui otonomi daerah ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah. Dalam praktiknya, pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari aspek fiskal daerah, yang meliputi pengumpulan serta pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Semua ini tercatat rapi pada Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah yang disusun setiap tahun. Adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah membuka jalan supaya daerah bisa memaksimalkan potensi sumber daya sehingga pendapatan yang diterima menjadi lebih optimal. Berbagai sumber pemasukan daerah mencakup Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, serta berbagai sumber pendapatan sah lainnya, yang keseluruhannya berperan penting dalam membiayai upaya pembangunan daerah.

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, bisa dilakukan melalui cara menaikkan penghasilan dari pajak daerah, seperti pajak hotel, dan juga dengan menambah banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta. Banyaknya pendatang yang berkunjung berkaitan dengan pajak hotel dan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah. Meningkatnya pendatang wisata yang datang ke Kota Yogyakarta berakibat pada naiknya penerimaan pajak dari sektor perhotelan yang pada gilirannya turut mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Meski demikian, hubungan tersebut tidak selalu bersifat langsung karena masih dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti tingkat hunian hotel, jumlah hotel yang tersedia, serta kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah.

Beberapa penelitian telah menguji dampak jumlah kunjungan wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan penelitian Fariz dan Arianti (2023), dengan judul “Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah Objek

Wisata, dan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 – 2019” hasil studi tentang dampak jumlah pendatang terhadap Pendapatan Asli Daerah di bidang pariwisata memberitahukan bahwa banyaknya wisatawan tidak memuat pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini diamati dari nilai koefisien yang mencapai 0,292900 serta tingkat signifikansi (probabilitas) senilai 0,0657 yang masih di bawah nilai minimum. Dengan kata lain, meskipun jumlah pendatang wisata meningkat sebesar 1 % hal tersebut tidak secara serta-merta berakibat pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Sementara itu, hasil dari analisis regresi memberitahukan bahwa pajak hotel memberikan kontribusi positif serta signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di bidang pariwisata. Dengan koefisien yang bernilai 0,553807 serta tingkat signifikansi 0,0000, dapat disimpulkan bahwa hubungan ini sangat kuat. Secara sederhana, diperkirakan bahwa setiap kali pajak hotel naik 1%, Pendapatan Asli Daerah sektor pariwisata akan bertambah sebesar 0,553807%.

Di sisi lain, pada penelitian Rahmi (2018), dengan judul “Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Retribusi Objek Wisata, Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Yogyakarta” dalam menganalisis ini, hasil uji hipotesis mengindikasikan yakni pajak hotel tidak memuat dampak yang signifikan kepada Pendapatan Asli Daerah. Ini ditunjukkan oleh besaran t hitung sebesar 1,040 yang lebih kecil dibandingkan dengan besaran t tabel yaitu 2,14479. Selain itu, besaran signifikan senilai 0,316 masih jauh diatas batas 0,05. Berdasarkan analisis data, dapat dikatakan bahwa pajak hotel tidak memberikan dampak yang memberikan efek pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Untuk memahami sejauh mana suatu daerah berinovasi dalam menambah Pendapatan Asli Daerah, perlu dilakukan analisis terhadap sumber-sumber yang paling dominan dalam menyumbang penerimaan tersebut. Melalui berbagai hasil penelitian, disarankan agar pemerintah terus mendorong peningkatan jumlah pendatang wisatawan serta penerimaan pajak dari pajak hotel. Langkah ini penting agar pendapatan daerah terus bertumbuh, yang pada akhirnya dapat mendukung kelancaran pembangunan dan mempercepat

pemulihan ekonomi pasca penurunan akibat pandemi Covid-19. Untuk mewujudkannya, pemerintah harus memperbaiki dan meningkatkan cara pengelolaan keuangan daerah agar lebih efisien dan efektif. Dari pemikiran dan situasi ini, penulis terdorong untuk melaksanakan penelitian mengenai **“Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta”**. Periode penelitian ini adalah tahun 2019-2023.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh jumlah kunjungan wisatawan terhadap pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta tahun 2019 sampai dengan tahun 2023?
2. Bagaimana pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta tahun 2019 sampai dengan tahun 2023?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada isu yang dirumuskan, kajian ini berfokus pada sasaran berikut ini:

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah kunjungan wisatawan terhadap pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta tahun 2019 sampai dengan 2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta tahun 2019 sampai dengan 2023.

D. Manfaat Penelitian

Kajian ini berpotensi memberikan kontribusi positif kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Berikut beberapa manfaat yang diharapkan:

1. Bagi para akademisi, temuan studi ini bisa dimanfaatkan sebagai referensi atau panduan untuk penelitian di masa depan, terutama yang mengeksplorasi hubungan antara jumlah kunjungan wisatawan dan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Untuk pihak praktisi atau Pemerintah Kota Yogyakarta, kajian ini diharapkan memberikan informasi tambahan dan saran yang bermanfaat

bagi lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah di area tersebut.